
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KABUPATEN SIDOARJO

Ana Diro
Arsiyah
Zeini Mahbub

(Program Studi Administrasi Negara - FISIP - Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo, email: ana.ajha95@yahoo.com; email: arsiyah@yahoo.com)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan sumber data yang berupa data primer dan data sekunder, dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) masih kurang dalam penyampaian informasi serta pelayanan kepada publik serta berkurangnya Petugas Lapangan Penyuluh KB (PLPKB), beban tugas Petugas Lapangan Penyuluh KB yang semakin bertambah berat, kesertaan KB Pria masih rendah terutama Medis Operasi Pria (MOP) masih rendah, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) masih sangat tinggi.

Kata kunci: pengendalian Pertumbuhan Penduduk, Program Keluarga Berencana, BPMPKB Sidoarjo

POLICY IMPLEMENTATION OF CONTROLLING POPULATION GROWTH IN SIDOARJO REGENCY

ABSTRACT

The purposes of this research was analyzing and describing the policy implementation of controlling population growth in Sidoarjo Regency. This research was using a source of data consists of primary and secondary data with collecting techniques of data namely: observation, interview and documentation. Data analyzing technique used qualitative analysis with descriptive approach that included: collecting of data, reduction of data, presentation of data, draw a conclusion. This result of this research indicated that information education communication was still lacking and giving services to the public and lacked of planning family trainer, the duty of planning family was rising, the participate of planning family for man still low especially medical man surgery, and population growth is quite high.

Keywords: control of population growth, family planning, BPMPKB Sidoarjo

PENDAHULUAN

Penduduk merupakan bagian dalam pembangunan di negara. Komponen terpenting dalam pembangunan tergantung dari kualitas penduduk. Masalah yang dihadapi di negara berkembang seperti Indonesia yaitu *baby bom*. Peledakan penduduk diperparah adanya stigma di masyarakat yang menurut filosofi jawa bahwa *banyak anak, banyak rezeki*. Stigma ini mengakibatkan meningkatnya angka kelahiran karena mereka menginginkan banyak anak. Peledakan penduduk tentu membawa tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengatasi masalah kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur, dan pelayanan publik.

Keberhasilan pemerintah Indonesia meraih *Population Awards* kini hanya tinggal cerita. Hal ini terbukti dengan angka kelahiran yang tinggi. Dalam lima tahun terakhir, jumlah peserta KB hanya bertambah 0,5% dari 57,4 % pasangan usia subur yang ada pada tahun 2007 dan pada tahun 2012 menjadi 57,9%. Sementara itu jumlah rata-rata anak tiap pasangan usia subur sejak tahun 2002-2012 di angka 2,6 per pasangan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nafisah Mboi menilai program Keluarga Berencana telah gagal karena angka fertilitas di Indonesia tidak menurun seperti yang diharapkan. (Sumber: Bidang Kependudukan disnakertransduk jatim/Sekretariat Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Jawa Timur, 2013:4-5). Seperti halnya di Kabupaten Sidoarjo Kebijakan dalam menanggulangi kepadatan penduduk belum berjalan lancar. Hal

ini dapat dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang setiap tahun terus meningkat, tahun 2012 sebanyak 2.053.467 jiwa, sedangkan per akhir Oktober tahun 2013 mencapai 2.084.854,

Apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus dibiarkan, maka akan terjadi berbagai masalah yang akan berpengaruh pada dampak sosial dan dampak ekonomi. Dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan baik dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum dan yang terpenting adalah kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Dari situlah muncul program KB yang ditangani oleh BPMPKB. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menekan pesatnya pertumbuhan penduduk yaitu, menggalakkan program Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan masal, sehingga akan mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat, kemudian ditindak lanjuti dengan lahirnya peraturan pemerintah (Perpres) Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Tujuan Keluarga Berencana.

Guna mewujudkan amanah dalam Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tersebut diperlukan kesamaan pandang dan persepsi pada Dinas/Badan/Instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur serta seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sehingga diperlukan sosialisasi tentang Program Keluarga Berencana. Sementara itu, untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) maka diperlukan perluasan jaringan dengan mitra kerja, baik dari pihak pemerintah maupun swasta serta Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang memadai.

Permasalahan kurangnya Petugas Lapangan Keluarga Berencana, kurangnya inovasi dalam sosialisasi serta Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) masih sangat tinggi sehingga hal ini dapat mempengaruhi *unmet need* yang akan menimbulkan masalah tersendiri dikemudian hari karena menyangkut beberapa hal seperti: kurangnya pengetahuan kepada masyarakat tentang pendewasaan usia perkawinan, usia kelahiran, jarak usia anak, yang nantinya dapat mengakibatkan tingginya angka kelahiran, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) sehingga tidak dapat menghasilkan masyarakat yang mempunyai kuantitas dan kualitas yang tinggi serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

Sesuai dengan latar belakang permasalahan dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- (1) Bagaimana Implementasi Kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada BPMPKB Kabupaten Sidoarjo)?
- (2) Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada BPMPKB Kabupaten Sidoarjo)?

Sedangkan tujuan penelitian ini antara lain:

- (1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung dan factor penghambat dari implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo.

LANDASAN TEORETIS

Kebijakan Publik

Secara umum istilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit perbedaan, sehingga tak ada masalah yang berarti bila kedua istilah itu dipergunakan secara bergantian. Pengertian istilah kebijakan dan kebijaksanaan juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

a. Kebijakan : kepandaian ; kemahiran

Kebijakan berarti :

- 1) Hal bijaksana, kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya);
- 2) Pimpinan dan cara bertindak (mengenai pemerintahan, perkumpulan dan sebagainya);
- 3) Kecakapan bertindak bila menghadapi orang lain (dalam kesulitan dan sebagainya).

b. Istilah kebijaksanaan biasanya digunakan untuk perbuatan yang baik, menguntungkan atau positif.

Kebijaksanaan berarti :

- 1) Pandai, mahir, dan selalu menggunakan akal budinya.
 - 2) Patah lidah dan pandai bercakap-cakap.
-

Menurut Winarno, (2002: 14) istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. W. I. Jenkins dalam Abdul Wahab, (2008: 40) menyebutkan bahwa kebijakan sebagai “*a set of interrelated decision concerning the selection of goal and the means of achieving them within a specified situation...*” hal tersebut dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait, berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu.

Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam Widodo (2001) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah “*policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This includes both one time efforts to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions.*”

Wahab (2012) menganggap implementasi kebijakan sebagai suatu proses, keluaran (*output*) dan hasil akhir (*outcome*). Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah maupun individu (kelompok) swasta agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan dari keputusan pemerintah yang telah dibuat sebelumnya.

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik dan mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan karena tidak mampu atau tidak dilaksanakan.

Menurut Edward III dan Van Mater dan Van Horn dalam Joko Widodo, 2001: 96-105) empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*) agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, dan arah kebijakan.

2. Sumber daya (*resources*)

Sumber daya meliputi sumberdaya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

3. Disposisi (*disposition*)

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) untuk melaksanakan kebijakan.

4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi dan pembagian kewenangan.

Konsep Penduduk

Menurut George W. Barclay terjemahan Rozy Munir dan Budiarto (1990) Penduduk adalah kumpulan manusia dan perhitungannya disusun menurut berbagai bentuk statistik tertentu. Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain menyatakan penduduk adalah warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Fahmi (2010) mengemukakan suatu pendapat yang tercantum dalam bukunya yang berjudul “*An Essay On The Principle of Population*” ia menyatakan bahwa jumlah penduduk akan melampaui jumlah persediaan bahan pangan yang dibutuhkan. Malthus berpendapat bahwa sebab utama timbulnya kemiskinan bukan semata-mata karena kesalahan organisasi masyarakat, tetapi semata-mata karena kesalahan manusia itu sendiri, yang tidak mau membatasi pertumbuhannya. Menurut Maltus ada 2 cara pengendalian penduduk, yaitu:

1. *Positive check* yaitu cara pengendalian yang tidak moralis dan tidak dapat dikontrol seperti perang, wabah, atau perlakuan manusia lainnya yang tidak berperikemanusiaan.
2. *Preventive check* yaitu dengan pengekangan moral dalam membatasi kelahiran (*birth control*) dengan cara menunda atau pendewasaan perkawinan (PUP).

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo serta mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo. Sumber data dalam penelitian ini yaitu: pertama data primer berupa data-data dari *key informan* (kepala bidang keluarga berencana), catatan hasil observasi tentang kondisi dan kejadian yang ditemui selama di lapangan dan catatan hasil wawancara. Kedua, data sekunder yang diperoleh peneliti berupa buku profil badan pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana di

Kabupaten Sidoarjo, buku sosialisasi program kerja BPMPKB, arsip-arsip yang dimiliki Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sidoarjo

Kebijakan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo yaitu melalui Program Keluarga Berencana, hal ini sejalan dengan pendapat Ibu Heni Kristiani, Spd., MM selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di BPMPKB Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bahwa:

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015. Program Pembangunan di Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sidoarjo, bertujuan untuk memantapkan kelangsungan program dan kelembagaan serta peningkatan kinerja program di setiap wilayah untuk pemenuhan permintaan masyarakat akan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera demi terwujudnya keluarga yang berkualitas dalam rangka membantu mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Kebijakan dilaksanakan untuk mencapai Program Keluarga Berencana melalui: 1) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui pembinaan kesehatan reproduksi remaja. 2) Meningkatkan kepedulian dan peran serta Pasangan Usia Subur (PUS) sebagai peserta KB untuk mewujudkan keluarga kecil sejahtera. 3) Meningkatkan keterampilan kader institusi masyarakat dalam pengelolaan program KB di wilayah pedesaan untuk menurunkan unmetneed serta drop out peserta KB. 4) Meningkatkan penyuluhan dan konseling pelayanan KB ditempat pelayanan KB untuk mewujudkan kepuasan PUS menggunakan alat kontrasepsi serta mencegah timbulnya kasus efek samping, komplikasi dan kegagalan akibat penggunaan alat kontrasepsi. (Hasil wawancara Ibu Heni Kristiani, 8 April 2014)

Untuk mencapai program keluarga berencana diperlukan strategi agar program keluarga berencana dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat terealisasi, jika program keluarga berencana terealisasi akan dapat membantu pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo yang setiap tahunnya terus meningkat. Sebagai penjabaran kebijakan, maka ditetapkan strategi operasional program keluarga berencana seperti yang dinyatakan oleh Ibu Heni Kristiani sebagai berikut:

Ada beberapa strategi dalam kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut meliputi: (1) Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan serta kesehatan reproduksi remaja. 2) Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengaturan kelahiran untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas. 3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan klinik KB pemerintah maupun swasta dalam memberikan pelayanan konseling dan penanggulangan efek samping, komplikasi dan kegagalan kontrasepsi. 4) Meningkatkan ketrampilan dan peran serta PPKBD dan Sub PPKBD dalam menyampaikan berbagai informasi dan motivasi KB kepada masyarakat diwilayah Desa/Kelurahan. 5) Meningkatkan cakupan pelayanan KB secara terpadu melalui operasi manunggal KB-Kes, Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan serta momen-momen penting lainnya. (Hasil wawancara Ibu Heni Kristiani, 8 April 2014)

Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan serta kesehatan reproduksi remaja sangat penting hal ini dilakukan agar masyarakat tidak melakukan pernikahan dini, pernikahan dini akan membuat seseorang akan memiliki seorang anak dalam usia yang masih mudah hal ini dapat membuat proses persalinan bisa lebih susah begitu pula bayi bisa lahir prematur atau bahkan meninggal yang nantinya akan dapat meningkatkan Angka Kematian Bayi (AKB), karena seorang ibu yang kurang pengetahuan dalam proses persalinan dan menjaga bayi dalam kandungan, dengan memberikan pengetahuan kesehatan reproduksi kepada remaja. Hal ini untuk mencegah agar tidak banyak remaja yang melakukan seks bebas, sehingga akan mengurangi jumlah pernikahan dibawah usia 20 tahun.

Dalam operasional kegiatan keluarga berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana memanfaatkan momentum lokal maupun provinsi. Hal ini senada dengan pernyataan wawancara dengan Ibu Heni Kristiani yaitu:

Kegiatan keluarga berencana yang dilakukan meliputi: (1) Kegiatan TNI manunggal KB-Kesehatan. 2) Kegiatan pelayanan KB dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. 3) Kegiatan pelayanan KB secara serentak dalam rangka hari Keluarga. 4) Kegiatan pelayanan KB HUT Korpri. 5) Kegiatan pelayanan KB hari jadi Kabupaten Sidoarjo. 6) Kegiatan pelayanan KB HUT dharma wanita. 7) Kegiatan Pelayanan KB dalam rangka Sidoarjo siap 24 jam wujudkan keluarga yang berkualitas tahun 2012 bersama dandim 0816 Sidoarjo, peringatan hari kartini, dan hari ibu. (Hasil wawancara Ibu Heni Kristiani, 8 April 2014)

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan kegiatan Keluarga Berencana (KB) di setiap hari peringatan/momen tertentu yang ada di Sidoarjo seperti di TNI manunggal, tidak hanya di masyarakat desa/kecamatan, momen-momen tertentu cukup banyak seperti pada saat hari jadi Kabupaten Sidoarjo, hari kartini dan hari ibu serta hari peringatan lainnya, ini menunjukkan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sering mengadakan sosialisasi program keluarga berencana agar masyarakat mudah mendapatkan informasi dan mengikuti program keluarga berencana sehingga program keluarga berencana dapat berjalan lancar dan terealisasi.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana menyusun Program Keluarga Berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan cara Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), melaksanakan sosialisasi melalui kegiatan TNI manunggal KB-Kesehatan, kegiatan pelayanan KB dalam rangka bulan bakti gotong royong masyarakat, kegiatan pelayanan KB secara serentak dalam rangka hari keluarga, kegiatan pelayanan KB HUT Korpri, kegiatan pelayanan KB hari jadi Kabupaten Sidoarjo, Kegiatan pelayanan KB HUT dharma wanita, kegiatan pelayanan KB dalam rangka Sidoarjo siap 24 jam wujudkan keluarga yang berkualitas bersama dandim 0816 Sidoarjo, peringatan hari kartini, dan hari ibu. Berdasarkan realita tersebut, maka diperkuat dengan teori konsep menurut Van Mater dan Van Horn tentang implementasi kebijakan.

Keempat konsep implementasi kebijakan tersebut apabila disesuaikan dengan realita yang ada, maka hasil yang diperoleh adalah:

1. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi dalam program keluarga Berencana yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yaitu dengan

cara Komunikasi Informasi Edukasi (KIE). Berdasarkan peraturan yang ada namun pada hakikatnya output (keluaran) dari hasil kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Sidoarjo dirasakan masih kurang bagi masyarakat karena sosialisasi kurang merata, kurangnya penyampaian informasi serta pelayanan kepada publik belum sesuai dengan visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana “Menuju masyarakat partisipatif dan berkeadilan Gender serta keluarga berkualitas untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.”

2. Sumber daya (*resources*)

Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program keluarga Berencana di BPMPKB yaitu Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD). Sumber daya manusia masih kurang karena satu PLKB memegang satu desa, standarnya satu desa dipegang oleh dua PLKB, sumber dana anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saja tidak ada pendapatan lainnya, kerjasama dengan Kodim 0816, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Sidoarjo, Dinas Kesehatan, Tim Pengerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Asosiasi Perusahaan Indonesia (APINDO), Bank Jatim, Badan Amil Zakat (BAZ) serta tokoh Agama. Sumber daya peralatan meliputi sound sistem, alat peraga, tensi darah, suntikan, alat-alat kontrasepsi, baner dan spanduk.

3. Disposisi (*disposition*)

Disposisi dilakukan dengan cara meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui pembinaan kesehatan reproduksi remaja, meningkatkan kepedulian dan peran serta Pasangan Usia Subur (PUS) sebagai peserta KB untuk mewujudkan Keluarga Kecil Sejahtera, meningkatkan ketrampilan kader institusi masyarakat dalam pengelolaan program KB di wilayah pedesaan untuk menurunkan unmetneed serta drop out peserta KB, meningkatkan penyuluhan dan konseling pelayanan KB ditempat tempat pelayanan KB untuk mewujudkan kepuasan PUS menggunakan alat kontrasepsi serta mencegah timbulnya kasus efek samping, komplikasi dan kegagalan akibat penggunaan alat kontrasepsi. Implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui Program Keluarga Berencana terealisasi jika dilihat dari Peserta aktif Semua Metode (PASM), namun jika dilihat dari tiap metode kontrasepsi ada 2 (dua) yang tidak terealisasi yaitu MOP dan kondom, dan prevalensinya juga menurun.

4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo Sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sehingga semakin jelas dan pasti.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sidoarjo

Faktor pendukung sama dengan kekuatan di BPMPKB Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui pembinaan kesehatan reproduksi remaja.
2. Meningkatkan kepedulian dan peran serta Pasangan Usia Subur (PUS) sebagai peserta KB untuk mewujudkan keluarga kecil sejahtera.
3. Meningkatnya ketrampilan kader institusi masyarakat dalam pengelolaan program KB di wilayah pedesaan untuk menurunkan *unmet need* serta drop out peserta KB.
4. Meningkatnya penyuluhan dan konseling pelayanan KB di tempat-tempat pelayanan KB untuk mewujudkan kepuasan Peserta Usia Subur (PUS) menggunakan alat kontrasepsi serta mencegah timbulnya kasus efek samping, komplikasi dan kegagalan akibat penggunaan alat kontrasepsi.

Faktor penghambat implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo

Faktor penghambat sama dengan kelemahan di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Semakin berkurangnya Petugas Lapangan Penyuluh KB (PLPKB),
 2. Beban tugas Petugas Lapangan Penyuluh KB yang semakin bertambah berat karena bentuk kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) KB Kabupaten Sidoarjo masih bergabung dengan Pemberdaya Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Sidoarjo,
 3. Kesertaan KB Pria masih rendah terutama Medis Operasi Pria (MOP) karena masih kuatnya persepsi masyarakat tentang pelaksanaan program KB adalah urusan perempuan,
 4. Peserta KB aktif masih didominasi oleh metode kontrasepsi suntik karena masyarakat Sidoarjo lebih menginginkan pelayanan KB yang bersifat praktis dan mudah didapat disekitar tempat tinggalnya,
-

5. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) masih sangat tinggi sehingga hal ini dapat mempengaruhi *unmet need*.

Untuk mengatasi adanya faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo melalui program keluarga berencana di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Sidoarjo dengan adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan (Bupati, legislatif dan internal organisasi), pemantapan organisasi kelembagaan dan peningkatan pelaksanaan program keluarga berencana dengan menambahkan jumlah petugas lapangan keluarga berencana, semakin menambah mitra kerja agar jaringan untuk sosialisasi lebih luas, terus mensosialisasikan KB untuk pria terutama Medis Operasi Pria (MOP).

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan terhadap “Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada BPMPKB Kabupaten Sidoarjo)”, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) masih kurang dalam penyampaian informasi serta pelayanan kepada publik.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) cukup baik mengenai kerjasama dengan mitra kerja akan tetapi kurang baik mengenai pekerja lapangan keluarga berencana karena jumlahnya yang sedikit.
- c. Disposisi terealisasi jika dilihat dari Peserta aktif Semua Metode (PASM), namun jika dilihat dari tiap metode kontrasepsi ada 2 (dua) yang tidak terealisasi yaitu MOP dan kondom, dan prevalensinya juga menurun.
- d. Struktur birokrasi sudah baik karena sudah dijalankan sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2008.

Meningkatnya ketrampilan kader institusi masyarakat dalam pengelolaan program KB di wilayah pedesaan untuk menurunkan *unmet need* serta *drop out* peserta KB, meningkatnya penyuluhan dan konseling Pelayanan KB di tempat-tempat pelayanan KB sedangkan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk yaitu semakin berkurangnya Petugas Lapangan Penyuluh KB (PLPKB), beban tugas petugas lapangan penyuluh KB yang semakin bertambah berat, kesertaan KB Pria

masih rendah terutama Medis Operasi Pria (MOP) masih rendah, dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) masih sangat tinggi.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Pada BPMPKB Kabupaten Sidoarjo)”, peneliti beranggapan ada beberapa rekomendasi yang harus dilakukan agar dalam peningkatan implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk, khususnya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Rekomendasi tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan inovasi dalam sosialisasi Program Keluarga Berencana.
- b. Perlunya penambahan Petugas Lapangan Penyuluh KB (PLPKB).
- c. Perlunya pengurangan tugas Petugas Lapangan Penyuluh KB.
- d. Meningkatkan kesertaan KB Pria terutama Medis Operasi Pria (MOP).
- e. Meningkatkan KIE kepada masyarakat agar tidak banyak *unmet need*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. (2013). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Barclay, W. George. (1990). *Teknik Analisis Kependudukan* (Terjemahan). Jakarta: Rineka Cipta.
- Buku Profil Tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga berencana Kabupaten Sidoarjo.
- Bulletin Kependudukan. 2013. Bidang Kependudukan disakertransduk jatim/Sekretariat Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Jawa Timur, Eisi III Nomor ISSN: 2337-5361.
- Fahmi, M. Aniqul. (2010). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Program Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan Pada Kawasan Pangan*. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Mantra, Ida Bagoes. (1985). *Pengantar Study Demografi*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- _____. (2003). *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sunggono, Bambang. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Administrasi Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
-

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Widodo, Joko. (2001). *Analisis Kebijakan Publik*. Insan Cendikia.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
